

BAB III
IMPLIKASI *MIÀNZI* DAN NASIONALISME TERHADAP
SENGKETA *LINE OF ACTUAL CONTROL* YANG
MEMPENGARUHI KEBUNTUAN DIPLOMATIK
TIONGKOK-INDIA

Respon sebuah negara merefleksikan kepentingan nasional yang telah dirancang berdasarkan berbagai pertimbangan baik secara internal maupun eksternal. menjadi instrumen pendukung pemikiran, bentuk budaya nasional, nilai, kepercayaan, dan gagasan. Begitupun Tiongkok yang secara konsisten mengembangkan budaya yang dinilai memiliki pengaruh signifikan pada pemeliharaan identitas nasional.

Bab ini berisikan mengenai respon pemerintah Tiongkok dari salah satu nilai budaya konfusianisme yaitu *Miànzei* dan unsur nasionalisme pada keputusan dalam menyelesaikan konflik LAC yang dinilai mengalami kebuntuan diplomatik. Penulis mencantumkan bukti konkret berdasarkan mekanisme *facework* dari pengamatan penulis terhadap penggalan kalimat maupun kata dari narasi para pemimpin Tiongkok. Narasi akan diambil dari situs resmi atau media Tiongkok yang merefleksikan unsur *Miànzei* dan nasionalisme. Penelitian akan mengadopsi teori Poliheuristik dan Teori *Face-Negotiation* dalam menganalisis variabel tersebut.

3.1 Faktor Kognitif Pemimpin Tiongkok melalui Implementasi Nasionalisme *Miànzi* dalam Konflik Perbatasan LAC

Faktor kognitif menjadi salah satu tahap yang berada dalam kajian Teori Poliheuristik (PH) dimana tahap ini membantu pengambilan keputusan. Menurut Mintz (2004: 7), setiap pemimpin negara melibatkan faktor kognitif dalam pengambilan keputusan. Dalam memproses kognitif beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu a) *dimension-based process* yang dipengaruhi oleh keyakinan, psikologis, nilai, kepribadian, dan kepentingan domestik sebelum memutuskan keputusan final; b) *avoid political lost* yang berarti takutnya kehilangan martabat, citra dan kekuasaan politik; dan. Seluruh faktor ini dipilih melalui prinsip *non-compensatory* atau menghilangkan alasan yang tidak menguntungkan

Berjuanginya Tiongkok untuk martabat negara selama hampir 100 tahun sepanjang masa transisi kolonial, reformasi pemerintahan dan aktivisme politik lainnya yang membentuk pemikiran ‘anti-inferioritas’. Mindset tersebut didukung oleh nasionalisme yang didorong oleh nilai kebudayaan *Miànzi*. Pendapat ini diperkuat oleh Prof. Zhao Changfeng dalam wawancara menyampaikan bahwa nasionalisme berkontribusi untuk membentuk jiwa kesetiaan dan kehormatan pada sebuah bangsa terutama dalam mengejar kesatuan nasional, kekuatan dan superioritas. Nilai wajah ini berkaitan erat dengan kehormatan nasional dan reputasi.

3.3.1 Nasionalisme pada proses Kognitif dalam Upaya penyelesaian LAC

Bersatunya para nasionalis politik menguatkan prinsip kolektivitas Tiongkok menjadi kunci dari penguatan diri bagi Partai Komunis Tiongkok (PRT). PRT mengatur strategi menghubungkan memori masa lalu (penghinaan nasional), saat ini (rekonstruksi negara kuat di dunia internasional), dan harapan masa depan (kejayaan Tiongkok). Memori ini dapat membentuk ikatan *in-group* yang setia dan nasionalistik kepada entitas yang dianggap *out-group* yang mendorong adanya difusi nasionalisme pada suatu krisis internasional atas sesuatu yang dianggap esensial bagi etnis maupun negaranya (Callahan, 2004: 6).

Nasionalisme merupakan prinsip politik yang selaras dengan politik nasional. Politik atas dasar budaya memproyeksikan sentralitas Tiongkok. Nasionalisme juga merupakan kalkulasi politik saat menghadapi tantangan terkait kedaulatan atau kebanggaan yang dilandasi oleh identitas nasional. Gagasan ini dapat mengaktifkan fungsi kognitif individu untuk mobilisasi sosial, legitimasi rezim dan penetapan kebijakan. Nasionalisme didistribusikan secara ‘top-down’ melalui para elit Tiongkok dan PRT.

Menurut Niu Guanjie (2017: 15), pemerintah Tiongkok berupaya untuk mentransplantasikan emosi nasionalistik yang dimuat pada budaya dan simbol nasionalisme lainnya. Sebagaimana kampanye Xi Jinping pada Pendidikan patriotism yang dilansir dari media *prcleader.org* pada kampanye tersebut, Xi Jinping menekankan kalimat “*Pressure will only make the Chinese people more united, and confrontation will not stop China from becoming stronger*” (RFA's Mandarin and Cantonese Services, 2021). Kalimat ‘*Chinese people more united*’

dapat diartikan sebagai bersatunya Tiongkok dalam menghadapi krisis dan konfrontasi. Tiongkok menilai bahwa tekanan internasional atas sebuah konflik justru membuat negaranya semakin kuat dalam menegakkan nasionalisme. Bersatunya masyarakat juga menandakan adanya dukungan publik yang krusial bagi kelangsungan kolektivitas. Situasi ini dapat meningkatkan pengaruh baik dari segi militer, ekonomi maupun politik sebagai simbol nasionalisme mereka.

Salah satu bentuk nasionalisme yang ditegakkan ialah nasionalisme pragmatik yaitu integritas pada wilayah kedaulatan dengan mengupayakan untuk menjaga teritorialnya untuk menghindari klaim dari pihak asing. ‘Apa yang menjadi milik negara harus diperjuangkan’ menjadi landasan kegigihan Tiongkok. Pada isu LAC, Tiongkok berargumen bahwa India beraksi untuk mengambil wilayah bagian Tiongkok seperti Aksai Chin, Tibet Selatan. Tibet merupakan wilayah Tiongkok dimana masih ada otoritas Tiongkok dan Tibet tidak bersifat sebagai negara independen. Tiongkok menilai bahwa India hendak menyingkirkan kedaulatan negaranya dan merebut Tibet (Teo, 2020: 8). Tindakan India mendapat respon dari Tiongkok salah satunya dengan menunjukkan nasionalisme nya melalui berbagai upaya. Bagian ini berupaya untuk menunjukkan adanya kontribusi nasionalisme pada aspek kognitif para pemimpin Tiongkok.

1) Adanya Perselisihan dalam waktu lama

Menurut data dari Crisis Watch (2023) mengungkapkan bahwa situasi konflik pada perbatasan LAC berada dalam status ‘*unchanged*’ yang menandai eskalasi

situasi yang masih stagnan. Konflik LAC meletus pada 1962 hingga saat ini telah mencapai 60 tahun situasi konflik tanpa perubahan signifikan.

2) Adanya narasi *anti-foreign*

Narasi anti-foreign digaungkan ketika sebuah negara bereaksi atas krisis yang diakibatkan oleh negara lain. Pada situasi ini lah internalisasi nasionalisme pada individu Tiongkok mudah disampaikan. Jiang Zemin menyampaikan pada pidato perayaan ke-14 Partai Komunis Tiongkok (PRT) bahwa *The Chinese people have never bowed to any foreign pressure and never will.*” (Jiang, 1989). Tiongkok juga tidak akan menyerah dengan mengorbankan kedaulatan nasionalnya kepada bangsa lain. Kalimat “*never bowed*” diartikan sebagai bangga atas kemandiriannya untuk selalu menjaga martabat meskipun dalam tekanan negara lain. Tiongkok berupaya untuk menjaga kemurnian proses domestik politiknya maupun nilai budaya agar terhindar dari intervensi negara asing yang dapat mengancam stabilitas negara. Termasuk bagaimana Tiongkok berupaya melindungi integritas atas berbagai “pelecehan verbal pada Tiongkok’ serta berlindungnya India pada isu nuklir di balik peperangan yang terjadi.

Survey yang dilakukan oleh Zhong dan Hwang (2019:16-17) menyoroti bahwa orang Tiongkok yang pro-demokrasi juga cenderung nasionalis. Pernyataan ini dikemukakan dari survei penduduk kota Tiongkok di 34 kota bahwa kaum urban yang berorientasi demokrat juga memiliki perasaan nasionalis yang lebih kuat. Oleh karena itu, sampel hasil survey menjadi gambaran bahwa nasionalisme telah mengakar pada setiap kalangan masyarakat Tiongkok. Tercermin pada dukungan

amerika atas konflik LAC yang digabungkan di social media Weibo. Konflik ini menimbulkan pandangan *Anti-India* yang marak digaungkan.

Narasi *anti-foreign* pada India terlihat pada fenomena penyebutan India sebagai "*India Asan*" yang mengarah pada konotasi negatif. Penyebutan ini menjadi cara beberapa masyarakat dalam mengemukakan ketidaksukaannya pada kebijakan Modi atas pembangunan infrastruktur di sepanjang perbatasan India-Tibet. Kebijakan ini dapat memblokir patroli Tiongkok dan menutup akses ke daerah lainnya. Lewat narasi "*India has illegally stolen southern Tibet, how should our country liberate the country?*" (Ling, 2009). Kalimat ini menyatakan bahwa kehadiran India di Tibet Selatan adalah illegal. Masyarakat Tiongkok menilai bahwa India menunjukkan keinginan untuk mengendalikan wilayah tersebut sehingga India dianggap 'mencuri' Tibet Selatan. Pandangan ini menurunkan simpati Tiongkok terhadap India atas hubungan bilateral mereka.

3) **Terlibatnya kekerasan atau perang**

Xi Jinping pada pidato nya pada 100 tahun Partai Komunis Tiongkok (RFA's Mandarin and Cantonese Services, 2021) menyampaikan bahwa "*We Chinese ... are not intimidated by threats of force*" Kalimat "*are not intimidated by threats of force*" menunjukkan ketegasan Tiongkok yang tidak gentar untuk menghadapi aksi koersif dan penyerangan militer. Prinsip ini diaktualisasikan oleh Tiongkok melalui kebijakan yang asertif terutama pada situasi LAC. Strategi militer yang tegas diikuti masifnya upaya pembangunan infrastruktur di Kawasan perbatasan.

Beberapa bentuk pembangunan dimulai sejak tahun 1950 pada infrastruktur ratusan kilometer pada jalan raya, landasan udara serta jalur kereta api. Dengan adanya pembangunan 624 desa, mobilisasi pasukan sebanyak 80.000 pasukan dengan 600 perlengkapan militer serta 100 pesawat tempur (Suwandono, 2022: 9-10). Tiongkok juga membangun tiga titik pertahanan yang berlokasi di Khurnak, Danau Panggang dan Spanggur dan di perbatasan Konka.

Aksi ini merupakan hasil refleksi dari pidato Xi Jinping menyampaikan pada jurnalis Tiongkok bahwa “...*You must be able to win a battle. Only if there are battles, there are opportunities*” (Liao, 2013). Pernyataan ini selaras dengan konteks strategi, persaingan atau prestasi Tiongkok atas kapasitas militer raksasa yang dibangun. “*Win a Battle*” mewakili mindset proaktif dan kompetitif untuk mencapai tujuan mereka membawa kepentingan nasional. Pandangan Tiongkok bahwa pertempuran dapat mencapai tujuan, mengatasi tantangan dan mengungguli pesaing. Perang merupakan momentum untuk memaksimalkan peluang baik mendapat informasi strategi lawan maupun memaksimalkan pengaruhnya di sekitar wilayah perbatasan.

4) Narasi yang melibatkan histori

Narasi berdasarkan histori juga digambarkan melalui pidato Xi Jinping menilai bahwa patriotisme pada era modern perlu difokuskan secara komprehensif dan sistematis untuk mencapai *Chinese Dream* sebagai nilai spiritual dan kekuatan. Xi Jinping menyampaikan pada pidatonya bahwa selama lebih dari 5000 tahun dalam catatan sejarah, tradisi patriotism telah memastikan bahwa bangsa Tiongkok bertahan untuk mencapai prestasi besar. Pernyataan ini mengacu pada kesediaan

Tiongkok menghadapi segala hal demi mempertahankan tujuannya (Liao, 2013). “*Achievement*” sendiri dapat diartikan sebagai kebanggaan nasional berupa kedaulatan yang mutlak serta kemenangan atas peningkatan kualitas hidup Masyarakat dan konflik yang dihadapi.

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok menegaskan sebagian besar dari penduduk di Arunachal Pradesh adalah bangsa Tionghoa. Oleh karena itu, lewat perwakilannya menyampaikan bahwa “...*Arunachal Pradesh is Chinese territory and Tawang (district) is only one place in it and we are claiming all of that - that's our position*” (Zongyi, 2020: 13). Pernyataan ‘*our position*’ menunjukkan penegasan bahwa Arunachal Pradesh merupakan hak Tiongkok yang tidak dapat diganggu gugat. Kalimat tersebut menunjukkan kepemilikan yang asertif karena menjadi bagian dari prinsip Xi Jinping yakni “*unifying Chinese people of all ethnic groups*” yang berarti Tibet menjadi bagian etnis grup Tiongkok

5) Adanya narasi viktimisasi

Jiang Zemin memobilisasi tekanan dunia internasional pada India dengan pernyataan “*India originated the tense situation in the region therefore the tensions in South Asia must be firmly blamed on India.*”(Zongyi, 2020). Kalimat “*must be firmly blamed on India*” merupakan statemen yang tegas atas India sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk eskalasi di Kawasan Asia Selatan. India juga yang menciptakan isu semakin kompleks dengan aksi klaim LAC secara ilegal dengan manipulasi peta dan mempengaruhi pemimpin Tibet. Tiongkok merasa dirugikan atas asi klaim India pada Tibet yang membuat kedaulatannya terancam. Narasi ini

sekaligus menandai Tiongkok yang melindungi integritasnya tidak ingin adanya mispersepsi dari internasional atas penyebab eskalasi.

6) Adanya narasi untuk martabat dan kehormatan

Internalisasi nasionalisme yang paling krusial ialah pada para prajurit perbatasan LAC. Karena merekalah wujud ‘rakyat’ yang memperjuangkan kedaulatan lewat berperang. Xi Jinping menyadari hal ini dengan memonitor dan memotivasi lewat pernyataan *“hailed the soldiers as models of border defence and encouraged them to persist in their efforts and make new contributions.”* (Indian Express, 2023). Kalimat ini menunjukkan apresiasi terhadap role model nasionalisme yang berdedikasi melanjutkan misi mempertahankan nasionalisme. Kalimat *“make new contributions”* mendorong prajurit lain sebagai garda terdepan perbatasan untuk meningkatkan kinerja dan prestasi yang berkelanjutan. Pernyataan ini berkaitan dengan perpecahan yang terjadi pada 5 Mei 2020 di Danau Pangong.

Tiongkok juga tak segan memberikan penghargaan pada prajurit yang berjasa dengan gelar *“Border-defending Hero”*. Tak hanya gelar, Tiongkok juga memberikan tanda jasa dengan memberikan nama sepanjang jalur G219 dengan 5 jembatan yang mengacu pada nama prajurit yang gugur seperti Jembatan Xiangrong, Jembatan Siyuan, Jembatan Zhouran dan Jembatan Honjun. Prajurit tersebut gugur setelah baku tembak dengan India di perbatasan Lembah Galwan pada 2020 silam (Global Times, 2022).

Tentu saja hal ini menjadi salah satu perwujudan bahwa pemerintah Tiongkok mendukung penuh pada siapapun yang menunjukkan jiwa patriotisme dan

nasionalisme nya dalam membela kedaulatan negara. Terlebih sengketa ini telah berlangsung lama sehingga perlu support secara konsisten agar para prajurit siap dalam menjadi garda terdepan memperjuangkan hak Tiongkok.

Pada tahap ini, Nasionalisme berperan sebagai salah satu dimensi politik domestik yang menjadi keputusan tanpa substitusi. Dimana paham nasionalisme diterima secara politis menjadi dasar dari munculnya sensitivitas dan kepuasan para pembuat kebijakan. Dalam teori PH, pilihan yang diterima akan dimaksimalkan daripada alternatif kebijakan lain yang mendapat penolakan. Sehingga akan memilih opsi yang paling memenuhi syarat dari dimensi atau pandangan pemimpin berdasarkan prinsip *non compensatory*. Prinsip ini akan menghilangkan alternatif keputusan yang tidak memenuhi kriteria tertentu.

Menurut Zhang (2005: 18) dalam jurnalnya "*Chinese Choices: A Poliheuristic Analysis of Foreign Policy Crises, 1950–1996*" mengklasifikasikan situasi yang menandai dimensi nasionalisme Tiongkok 1) Tiongkok merasa terancam dengan musuh komunis yang dengan keras menentang komunisme (Amerika Serikat, India); 2) Menegaskan integritas teritorial secara kolektivitas; 3) Mempertahankan pengaruh Tiongkok dan ideologi pada kawasan regional. Tiongkok menilai situasi tersebut mengancam eksistensi nya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mengaktifkan prinsip *non-compensatory* dimana tidak adanya alternatif kebijakan yang dapat menyingkirkan tiga hal tersebut sebagai kepentingan nasional utama Tiongkok

Sentimen nasionalistik semakin meningkat setelah Amerika Serikat mendaratkan *American nuclear-powered aircraft* di Kawasan sengketa yang menjadi simbol Kerjasama pertahanan India-AS. Tiongkok menilai AS memanfaatkan konflik untuk menjadikan Kawasan Asia Selatan sebagai area utama pembangunan strategi '*free and open Indo-Pacific*' yang memicu persaingan hingga konfrontasi bilateral antara AS-Tiongkok. Tiongkok mengeliminasi keputusan berdamai dan mengambil keputusan asertif di Konflik LAC lewat narasi Xi Jinping pidato Xi Jinping menyampaikan pada jurnalis Tiongkok bahwa "*shape our security posture, deter and manage crises, conflicts, and win local wars*" (Zhao, 2013).

Dari penyampaian tersebut dapat melihat bahwa Tiongkok memiliki dasar nasionalisme yang melekat sebelum era modern. Terlebih ditetapkannya bentuk pemerintahan Sosialisme yang berada dibawah naungan Partai Komunis Tiongkok (PKT) sebagai pemimpin yang terlegitimasi. PRT berperan untuk menetapkan strategi, merumuskan kebijakan hingga mengeksekusi kebijakan tersebut. Karena itu perlu memahami bahwa nasionalisme menjadi faktor yang diimplementasikan secara nyata pada setiap kebijakan dan narasi. Hasil analisis tersebut apabila dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
 Hasil Konstruksi Nilai Internal Nasionalisme

Nasionalisme di Sengketa pada Situasi Resmi	Ya/Tidak
Adanya Perselisihan dalam waktu lama	Ya
Adanya narasi <i>anti-foreign</i>	Ya
Terlibatnya kekerasan atau perang	Ya
Narasi berdasarkan catatan histori	Ya
Adanya narasi viktimisasi	Ya
Adanya narasi untuk martabat dan kehormatan	Ya

Sumber: Cotillon (2017), diolah.

Dari hasil analisis mengemukakan bahwa narasi nasionalisme digaungkan secara massif. Hal ini, mengindikasikan adanya tahap kognitif yang kuat berdasarkan dimensi proses. Aspek kognitif berperan untuk mengaktifkan perasaan, memori dan keyakinan yang dimiliki individu. Semakin kuat dimensi proses maka berbanding lurus dengan keputusan yang dipilih harus memenuhi kriteria yang krusial. Oleh karena itu, akan memakan waktu lama dalam proses penyelesaian konflik. Nasionalisme menjadi sebuah ideologi/keyakinan yang selalu terdoktrin sehingga sulit untuk merumuskan kebijakan tanpa melibatkan nasionalisme bagi para pembuat kebijakan luar negeri terutama menyangkut pada kedaulatan dan kehormatan negara.

3.3.2 Miànzei pada proses Kognitif dalam upaya penyelesaian LAC

Dalam proses kognitif sebagai aspek kunci pada keputusan yang melibatkan mekanisme wajah (*face-work*) berperan dapat dianggap sebagai otoritas individu untuk mengatur citra yang ditunjukkan terutama dalam mencapai kepentingan. Komitmen Tiongkok pada '*national face*' atau martabat bangsa pun memiliki keterkaitan antara emosi maupun kepentingan. Proses dalam mewujudkan '*national face*' menjadi sebuah persoalan kolektif dimana individu diuntungkan karena status sosial. Citra personal yang dikolektifkan oleh para elit Tiongkok mendorong terbentuknya '*national Miànzei*' dalam interaksinya dengan negara lain. Prof. Zhao Changfeng dalam wawancara menjelaskan pendapatnya mengenai Miànzei

“Miànzei is a Chinese cultural concept that can be translated as "face" or 'social reputation'. Maintaining miànzei is about preserving one's dignity, respect, and social standing. miànzei can play a significant role in building diplomatic relations. (Miànzei adalah konsep budaya Tiongkok yang dapat diterjemahkan sebagai "wajah" atau "reputasi sosial". Mempertahankan miànzei berarti menjaga martabat, rasa hormat, dan status sosial seseorang. miànzei dapat memainkan peran penting dalam membangun hubungan diplomatik)”

Menurutnya, *Miànzei* berperan penting sebagai persepsi mengenai '*public image*' yang menandai legitimasi, kolektivitas dan reputasi social. Lebih lanjut, Prof Zhao menyampaikan bahwa bentuk menghargai *Miànzei* ialah dengan menghormati kedaulatan dan urusan dalam negeri Tiongkok. Tiongkok berkomitmen memandang bahwa kedaulatan merupakan "*national core interest*" yang absolut sebagai kekuasaan negara (Decoding China, 2021). Jika adanya

intervensi maka akan timbul konflik dan ketegangan. Karena itu, kedaulatan menjadi faktor dapat memicu sensitivitas Tiongkok pada *Miànzi*.

Intervensi dan pelanggaran kedaulatan teritorial Tiongkok oleh India adalah pada Aksai Chin, dan Arunachal Pradesh. Tindakan ini menandai hilangnya *Miànzi* Tiongkok yang menyebabkan hubungan kedua negara dalam ketegangan. Terlebih, kebijakan India yang pro-Amerika Serikat semakin membuat sensitivitas *Miànzi* meningkat. Tiongkok tidak ingin kehilangan wajah karena wilayah sengketa erat kaitannya dengan identitas sosial, yakni Tibet. Tiongkok pun berupaya menyelamatkan *Miànzi* atau martabatnya untuk menghindari *Avoid Political loss* yang diterapkan dalam kebijakan domestiknya. Agar memudahkan pemahaman, penulis menyusun alur pemikiran untuk model analisis *Miànzi* dan faktor yang mempengaruhinya.

***Miànzi* pada Kebijakan Internal Pemerintah Tiongkok**

Sebuah keputusan berasal dari lingkungan politik yang berkembang berdasarkan nilai, budaya dan kebiasaan di dalamnya. Simon (2015) berpendapat bahwa proses kognitif sangat bergantung pada struktur sosial dan pengetahuan yang diperoleh dari masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi bagaimana negara menetapkan keputusan perlu dilakukan dengan memperhatikan lingkungan sosial yang bebas maupun pilihan para pembuat keputusan yang substantif. Batas itulah yang dapat mendeskripsikan tindakan efektif yang berkaitan dengan kebijakan yang diusulkan. Kebijakan tersebut harus mencakup kepentingan nasional yang sesuai dengan tujuan negara agar memiliki penerimaan yang besar.

Oleh karena itu, suatu keputusan harus dapat diterima oleh beberapa kalangan dan kelompok yang relevan. Penerimaan kebijakan di level domestik mengindikasikan bahwa kebijakan dapat diterapkan dalam konteks internasional.

Dalam menganalisis pola penentuan kebijakan nasional Tiongkok dapat dipahami berdasarkan karakteristik kepentingan nasionalnya yang diidentifikasi berdasarkan tiga hal. *Pertama*, kepentingan nasional dipandang sebagai bentuk kolektivitas budaya nasional yang tidak hanya bersifat politik atau ekonomi namun juga nilai tradisi dengan solidaritas. *Kedua*, kepentingan nasional dianggap sebagai prinsip yang relatif stabil dalam jangka panjang. *Ketiga*, dapat mewakili kepentingan kolektif kelompok yaitu PKT yang dianggap sebagai representasi dari integritas Tiongkok. Tiongkok menetapkan “kepentingan utama yang memiliki dampak substantif yaitu pertumbuhan ekonomi, kepentingan kedaulatan dan kepentingan stabilitas sosial. Stabilitas menjadi fokus utama Tiongkok terutama pada keamanan dan wilayahnya (Gupta, 2012: 5).

Menurut Zhao (2017) menyebutkan bahwa *Miànzì* berperan dalam aspek kognitif yang mendeskripsikan i) kolektivitas, ii) legitimasi, iii) reputasi. Keempat aspek tersebut diadopsi dalam kebijakan domestik Tiongkok yang berperan membentuk output kebijakan. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis *Miànzì* berdasarkan keempat kode *Miànzì* tersebut:

1. Kolektivitas

Dengan latar belakang sosialis dan doktrin konfusius, Tiongkok menganut kolektivitas yang kuat. Oleh karena itu, banyak kebijakannya yang diangkat

berdasarkan kolektivitas. Menurut Brewer (2018) menyebutkan bahwa kolektivisme berarti internalisasi norma dan karakteristik sebuah grup yang di rekognisi sebagai bagian dari grup lainnya secara konsisten. Pada Isu LAC banyak menyoroti Tibet yang menjadi wilayah sengketa terjadi. Tibet dianggap oleh Tiongkok sebagai "*inseparable part of multinational China*" (PRC 1987) yang berarti adanya legitimasi Tiongkok di wilayah konflik ini. Interpretasi Tiongkok berdasarkan pakta 821 menyebutkan hubungan Tiongkok-Tibet sebagai "paman-sepupu" sehingga Tibet adalah aliansi Tiongkok yang berada di bawah kedaulatannya (Gupta, 2012: 7).

Orang Tionghoa memegang gagasan bahwa anggota keluarga harus terikat kuat dengan keluarga mereka. Pandangan ini berasal dari gagasan *Miànzi* yang menganut kolektivisme berbasis keluarga sebagai tatanan horizontal yang berkaitan dengan kesatuan identitas. *Familism* atau pandangan kekeluargaan menjadi salah satu ciri kolektivitas. Tiongkok menyusun kebijakan otonomi minoritas nasional berbentuk berbagai pasal tentang otonomi daerah nasional dalam konstitusi RRC 1983 dan dalam UU tentang Otonomi Nasional Daerah (LRNA). Konstitusi ini berelevansi dengan pandangan bahwa Tibet merupakan bagian dari Tiongkok berdasarkan doktrin *socialism* yang mana menekankan bahwa kependudukan Tiongkok di Tibet merupakan upaya "pembebasan" dari kolonialisme yang menjajah.

Oleh karena itu, Tibet dilibatkan dalam proyek perencanaan jangka Panjang Tiongkok dalam *Five-Year-Plan* ke-14 yang berkaitan dengan Tibet. Rencana ini

memaparkan bagian integral dari strategi pemerintahan Tiongkok yang berfokus pada strategi. Beberapa rencana tersebut, yaitu: 1) Menumpas doktrin Dalai Lama ke-14 sebagai separatis dengan memperkuat karakteristik Tiongkok; 2) Memperluas pengawasan di area terpencil yang dipimpin para member partai; 3) Menumpas separatis dengan Undang-undang anti-terorisme; 5) Membangun Taman konservasi dan peradaban hijau yang dapat difungsikan sebagai wisata, dan bendungan (Purici, 2021: 20).

Selain karena faktor histori, Tiongkok menilai kolektibilitas melalui pernyataan “*Chinese nation’s cohesiveness will be further strengthened.*” Kalimat tersebut menandakan mengenai solidaritas Tiongkok pada setiap bagian yang dianggap bangsanya. Persatuan dan kohesivitas bangsa Tiongkok akan menguatkan Tiongkok secara internal. Kalimat ini juga berfokus pada aksi untuk menguatkan persatuan bangsa Tiongkok. Hal ini menandakan bahwa Tiongkok menghargai kolektivitas secara konsisten sehingga menjadi kepentingan utama yang harus ditegakkan.

2. Legitimasi

Legitimasi menandai kapabilitas sebuah entitas dalam pengambilan keputusan Legitimasi negara direpresentasikan oleh pemerintahnya, Partai Komunis China (PKC) menjadi wujud legitimasi Tiongkok. PKC berupaya mempertahankan legitimasi yang dapat mendorong pada kredibilitas dan otoritas pemerintah. Selain itu, legitimasi membantu PKC untuk mempertahankan reputasi pada dunia internasional yang penting bagi relasi diplomatic dan ekonomi. Oleh

karena itu, PKC mempertahankan legitimasinya untuk aspek ekonomi, ideologi, budaya, pemerintah dan kedaulatan. PKC mengklaim bahwa legitimasi berbanding lurus dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan kedaulatan nasional. Legitimasi juga bagian dari *'national dignity'* atau kehormatan nasional (Review, 2021).

Pada isu LAC, Tiongkok menilai legitimasi dan kedaulatan tidak dapat dipisahkan. Tiongkok memandang bahwa kedaulatan relevan dengan stabilitas domestik politik. Sehingga penyelesaian konflik perbatasan merupakan bagian dari Upaya Tiongkok untuk menjamin kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Sebagaimana PRT (The Publicity Department of the CPC Central Committee) dalam pernyataannya bahwa *"China's sovereignty, security and development interests always rest in China's own hands"*. Kalimat *"always rest in China's own Hands"* mencerminkan kedaulatan merupakan sepenuhnya berada dalam kendali Tiongkok dengan integritasnya. Tiongkok tidak akan didominasi oleh faktor eksternal. Menurut Gupta (2016) bahwa legitimasi adalah bagian dari Upaya mempertahankan *Miànzi*. Kebijakan ini sebagai refleksi dari kepentingan Tiongkok sebagai perwujudan Mekanisme *Facework Miànzi*

3. Reputasi

Salah satu tujuan utama Tiongkok dalam merancang kebijakan ialah untuk sebuah reputasi dan rekognisi. Menurut Zhang (2016) Tiongkok masuk dalam kategori keinginan untuk *'Thick recognition'* yang berarti keinginan untuk dikenal memiliki kekuatan sosial dan ideologi. Presiden Xi Jinping menegaskan akan

meningkatkan reputasi Tiongkok sebagai “*a great socialist nation*” (RFA's Mandarin and Cantonese Services, 2021). Istilah tersebut merujuk pada peningkatan kapabilitas Tiongkok sebagai negara sosialis dalam segala aspek yang membuat Tiongkok dihargai sebagai bangsa yang besar. Pada isu LAC, Tiongkok berupaya untuk menegakkan kedaulatan yang balut dengan ‘*peace and tranquility*’ di sepanjang perbatasan. Tiongkok berupaya untuk menepati perjanjian.

Menteri Pertahanan Tiongkok, Wu Qian menyampaikan bahwa “*China would not take any unilateral moves which could affect the border situation and maintain the peace and stability of the border with the Chinese military.*” (Reuters, 2016) Pernyataan tersebut selaras dengan tujuan Tiongkok untuk mempertahankan reputasi sebagai negara yang bertanggung untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di sekitar perbatasan dengan kontribusi militer. Tiongkok ingin dihargai sebagai bangsa yang beradab.

Kebijakan internal Tiongkok untuk berdampak besar bagi proses pembuatan keputusan bagi kebijakan selanjutnya. Kebijakan Internal memuat pertimbangan, kebiasaan dan menjadi acuan pada output kebijakan luar negeri yang dihasilkan. Terutama Tibet menjadi wilayah yang penting untuk dianalisis karena wilayah konflik berada pada area Tibet seperti Aksai Chin yang diklaim oleh Tiongkok dan India. Kemudian Arunachal Pradesh yang dianggap sebagai ‘*south tibet*’. Asas kolektivitas yang dianut Tiongkok melekat menjadi landasan klaim Tiongkok atas Tibet.

Menurut teori *face negotiation* mengatakan bahwa kolektivisme mempengaruhi mekanisme facework dalam istilah *Miànzhi* berbasis otonomi. Oleh karena itu, Tiongkok memberikan otonomi Tibet dalam istilah *Tibet Autonomous Region* (TAR) karena prinsip kolektivitas yang dianut mengedepankan ‘*we*’ sebagai identitas Bersama. *Miànzhi* merefleksikan kebijakan Tiongkok di Tibet sebagai penguatan budaya untuk mendapatkan kekuatan kolektivitas. Oleh karena itu, analisis *Miànzhi* dapat dirangkum berdasarkan tabel analisis sebagai berikut

Tabel 3. 2
Hasil Konstruksi Nilai Internal *Miànzhi*

Unit Kalimat	Makna	Sub kategori	Kode
1. “ <i>China would not take any unilateral moves which could affect the border situation and maintain the peace and stability of the border with the Chinese military.</i> ”	Reputasi menjaga perdamaian	Kognitif	Reputasi
2. “ <i>Tibet is inseparable part of multinational China</i> ”	Kolektivitas Tiongkok yang kuat	Nilai Kolektivitas sosial-budaya	Kolektivitas
3. “ <i>China's sovereignty, security and development interests always rest in China's own hands</i> ”.	Legitimasi Rezim PKC	<i>Avoid Political Lose</i>	Legitimasi

Sumber: Zhou (2017), diolah.

Dari berbagai narasi yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa Tiongkok selalu berupaya mempertahankan *Miànzi* yang berwujud reputasi, integritas untuk citra yang baik. Selain itu, *Miànzi* juga dipengaruhi oleh nasionalisme yang membuat Tiongkok semakin gigih dalam mencapai tujuannya. Nasionalisme *Miànzi* berperan sebagai faktor kognitif yang mendorong perbaikan reputasi yang telah tertindas dalam '*national humiliation*'.

3.2 Rasionalitas Tiongkok dalam Kebijakan menghadapi Isu LAC

Dalam menganalisis kebijakan luar negeri perlu multilevel dalam memahami faktor dan motivasi untuk mengerti alur kebijakan luar negeri. Adanya keterkaitan politik yang menciptakan citra paradoks Tiongkok di bidang hubungan luar negeri dengan keputusan rasional keputusan pemerintah dan identitas, norma sosial sebagai upaya diplomasi pragmatis. Hal ini karena keputusan berkaitan dengan legitimasi internal rezim otoriter. Dimensi identitas nasional Tionghoa kemudian ditransformasi menjadi urusan luar negeri untuk meningkatkan moral dan karakter RRT dalam mengejar status kekuatan besar yang sah di arena internasional. Peran kebijakan luar negeri mempengaruhi "pendapat dunia" tentang status sosial untuk membentengi dari ujaran negatif.

Tiongkok telah melakukan orientasi ke arah yang lebih tegas ketika bereaksi keras dalam merespon kebijakan negara lain yang bersifat offensive yang dapat menghina kebanggaan dan kedaulatan nasionalnya. Sebagaimana deklarasi Xi Jinping pada Kongres Partai ke-19 bahwa "*the Chinese nation...now stands tall and firm..*" yang mengindikasikan sikap optimisme dalam meningkatkan kemampuan

Tiongkok sebagai rising power. Pola baru tersebut menegaskan kekuasaan dan kedaulatan pada wilayah sengketa secara agresif. Agresivitas itu tertuang dalam isu perbatasan seperti Tibet (Aksai Chin dan Arunachal Pradesh) yang dianggap mencerminkan “*China’s territorial integrity, but also the legitimacy of the Chinese Communist Party as the ruling party of China*” (Purici, 2021). Keinginan untuk meningkatkan legitimasinya membentuk keyakinan Tiongkok untuk meningkatkan kapabilitasnya. Oleh karena itu, Tiongkok semakin proaktif dalam mengejar kekuatannya terutama dalam sengketa wilayah yang berdampak pada integritas pemimpinnya.

Kebijakan luar negeri Tiongkok menjadi landasan menganalisis konflik LAC. Dimana berfokus pada kebijakan Tiongkok-India maupun kebijakan Tiongkok pada Kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah yang menjadi fokus Tiongkok ialah Tibet dan India dalam merancang kebijakan jangka Panjang. Pilar strategi Tiongkok antara lain:

1. Periphery Diplomacy

Konsep dalam upaya diplomatic resmi dimana berfokus pada diplomasi dengan para negara tetangga. *Periphery Diplomacy* mewakili prinsip kolektivitas Tiongkok yang membuat strategi rasional ini ingin bekerja lebih erat dengan negara kawasan termasuk dalam keamanan, perdagangan dan investasi serta penyeimbang geopolitik. Hal ini guna memperluas pengaruhnya dan mengembalikan citra Tiongkok di Kawasan yang dinilai sebagai ‘*Regional Hotspot*’ atau Titik Panas Regional. Regional Hotspots tersebut mencakup Laut Cina Selatan dan perbatasan

dengan India. Strategi ini menjadi salah satu sumber terciptanya ketegangan dengan Amerika Serikat.

Periphery Diplomacy dianggap krusial untuk mencapai tujuan Tiongkok seperti “*Chinese dream of the great rejuvenation*’ Salah satu jalannya dengan menjaga hubungan baik dengan negara yang dapat membantu Tiongkok seperti Pakistan, Nepal, Bhutan, dan sebagainya. Kebijakan ini melakukan ekspansi ‘*Look East and Look West too*’ yang berarti akan dihubungkan konektivitas antara Tiongkok, Asia, Eropa dan Afrika (Purici, 2021).

Aspek kunci dari strategi *Periphery Diplomacy* adalah

- a) Kerjasama Ekonomi antara Tiongkok dengan negara kawasan termasuk pengembangan proyek-proyek infrastruktur, investasi dan perjanjian perdagangan. Beberapa forum organisasi regional yang dikembangkan seperti *Shanghai Cooperation Organization (SCO)* dan *China-ASEAN Free Trade Area* sebagai upaya untuk ekspansi pengaruh geopolitik Tiongkok.
 - b) Pertukaran budaya untuk mempromosikan soft powernya melalui pertukaran budaya, program Pendidikan dan diplomasi antarwarga di negara-negara tetangganya
2. *One Belt, One Road*’ (*OBOR*), atau *Belt and Road Initiative (BRI)*.

Strategi ini merupakan komponen kunci dari *Periphery Diplomacy* yang ambisius dalam rangka menciptakan ‘*regional system with Chinese Leadership*’. Proyek ambisius ini guna menciptakan reputasi Tiongkok sebagai pemimpin regional. OBOR menargetkan Asia Tengah dan Selatan secara spesifik. Rencana obor dirancang untuk membangun infrastruktur dan komunikasi untuk ekonomi

jangka panjang. Selain itu, Tiongkok akan meningkatkan global politik ekonomi melalui *Silk Route* terutama menciptakan Tiongkok-Nepal zona perdagangan bebas. Oleh karena itu, *Tibet Autonomous Region* (TAR) dianggap sebagai penghubung yang strategis antara Tiongkok dan Nepal. Hal ini membuat India menolak untuk bergabung karena akan meningkatkan pengaruh Tiongkok dengan negara tetangga. Tiongkok merancang untuk “...end the India’s geographical hegemony over the rest of South Asia” (Carlson, 2004).

3. Modernisasi Militer

Fokus utama dalam meningkatkan strategi ‘*rising power*’ ialah memfasilitasi militer dengan massif sebagai bentuk distribusi kekuatan. Modernisasi menjadi upaya Tiongkok untuk mewujudkan nilai legitimasi atau kekuatan dari sisi militer. Upaya ini untuk menyeimbangkan kontestasi politik yang terjadi antara Tiongkok-AS lewat India. Oleh karena itu, Tiongkok membekali militer dengan peralatan terbaik yang meningkatkan pembelian misil sebesar 5.9% di tahun 2011-2015. Tiongkok pun meningkatkan rudal nuklir dan balistik untuk menargetkan India. Strategi baik darat maupun laut dirancang untuk memproyeksikan kedaulatannya. Hal ini bertujuan untuk “*preventing India’s emergence as an Asian and Global Power*”. Penerapan strategi modernisasi militer dapat dilihat pada bagaimana isu LAC berkembang. Militer Tiongkok telah membangun pemanas air tenaga surya, membangun sumur, pemukiman dan meningkatkan kapasitas tentara di dekat Ladakh. Tindakan Tiongkok memberi sinyal peringatan bagi India terhadap keintiman yang dibangun dengan AS.

Pandangan ini tidak terlepas dari bagaimana Tiongkok memandang India sebagai ‘middle power’ bukan ‘major power’ sehingga Tiongkok tidak melihat India sebagai kekuatan utama dalam arenanya. Oleh karena itu, Tiongkok berupaya untuk “*..holds the standing of South Asia’s regional power and relentlessly tries to join the ranks of global major powers*” (Zhao, 2013). Kalimat tersebut dapat dianalisis bahwa ambisi Tiongkok untuk bergabung dalam negara yang berkekuatan besar dilakukannya secara konsisten terutama untuk mempengaruhi negara-negara Asia Selatan. Tiongkok juga melihat bahwa kapabilitas militernya lebih unggul dibanding India. India justru merupakan tangan kanan AS yang mendapat banyak dukungan. Tiongkok akan menegaskan strateginya a) mengeksploitasi kerentanan India; b) menjaga batas yang tidak tetap sebagai alat tawar menawar; c) melemahkan India dengan sengketa perbatasan India-Pakistan dan Tiongkok-India di utara untuk terus menggempur India.

Kebijakan luar negeri penting untuk mempertimbangkan siapakah rival yang perlu diperhatikan ataupun tidak. Berdasarkan teori poliheuristik mengungkapkan proses pembuatan keputusan berdasarkan kognitif menuju rasional. Dimana kognitif dipengaruhi oleh ‘*avoid political lost*’ yang berarti takutnya kehilangan posisi politik. *Non compensatory* merupakan prinsip menyeleksi pilihan berdasarkan kebijakan yang paling prioritas pada faktor kontekstual seperti bahan pertimbangan mitra koalisi secara signifikan. Dalam hal ini merupakan socialism-komunis yang bersifat keputusan pemimpin adalah absolut dengan kolektivitas yang tinggi sebagai negara sosialis.

Kemudian factor rasional lainnya seperti proyek OBOR, keterkaitan Indian-AS, *Model periphery diplomacy* dan modernisasi militer mengarah pada proses tawar menawar. *Status quo* menjadi landasan tawar menawar untuk meningkatkan pengaruh. Hal ini pun berdampak pada output kebijakan yang dihasilkan apakah akan antagonisme atau justru tindakan positif yang dihasilkan.

Hal ini relevan bagi Tiongkok yang menilai bahwa Kerjasama India-AS akan membawa pada mudahnya eksistensi, reputasi dan citra Tiongkok di mata publik internasional. Citra, reputasi merupakan perwujudan *Miànzi* Tiongkok yang harus dijaga lewat kebijakan yang visioner dan efektif.

3.3 Upaya Negosiasi sebagai Resolusi Konflik pada isu *Line of Actual Control*

Ting Toomey (1998) dalam teorinya *Face negotiation* menyampaikan bahwa setiap individu memiliki pandangan masing-masing mengenai cara bernegosiasi yang dipengaruhi oleh budaya wajah. Teori ini berfokus pada konflik yang akan merusak face atau citra seseorang dan negara berakibat pada renggangnya hubungan antar dua entitas tersebut. Oleh karena itu, Toomey (1998) menilai tiga hal yang perlu dipenuhi agar adanya kesinambungan dalam bernegosiasi antar budaya, yakni *i) Knowledge; ii) Mindfulness; dan iii) Interaction skill*

Pasang surut konflik yang terjadi di tengah hubungan antara Tiongkok dan India menciptakan kerenggangan dari relasi diplomatic yang mereka jalani. Baik Tiongkok maupun India menyadari sengketa perbatasan yang dihadapi kedua pihak menjadi konflik yang paling berlarut-larut dan sulit dalam penyelesaian. Konflik

yang terjadi berlarut-larut hingga berturut-turut kepemimpinan politik di kedua negara. Terlepas dari kukuhnya kedua negara mempertahankan kepentingan. Tapan (2020) menyebutkan Tiongkok dan India termasuk dua negara yang memiliki budaya kolektivitas tinggi yang dapat mempengaruhi pandangan bernegosiasi. Telah diadakan berbagai putaran pembicaraan, maupun kunjungan di tingkat tinggi serta penandatanganan perjanjian besar yang memuat langkah-langkah diplomatik.

3.3.1 Perjanjian Panchsheel (*Panchsheel Agreement*)

Kompleksitas konflik antara Tiongkok dan India menarik perhatian dunia internasional untuk melakukan penyelesaian isu. Salah satu upaya untuk mendorong penyelesaian isu ialah dengan upaya diplomatik melalui pembicaraan maupun perjanjian. Berdasarkan prinsip "*Peaceful Cooperation*", *Panchsheel agreement* menjadi salah satu upaya awal untuk mendorong hubungan pihak India dan Tiongkok untuk menjalin hubungan dengan kooperatif dan damai. Dibentuk pada 29 April 1954 berdasarkan Perjanjian Dagang dan Hubungan Tibet dan India. Perjanjian ini menjadi indikasi bahwa isu semakin memanas dan memerlukan bentuk perbincangan untuk memediasi pertikaian (Dasgupta, 2016: 17).

Esensi dari *Panchsheel Agreement* adalah dengan membangun hidup berdampingan secara damai melalui lima prinsip. Istilah Paacsheel berasal dari prasasti buddha yang mengandung arti yaitu Panca berarti 'lima' dan 'Shell' yang berarti prinsip. Relevansi perjanjian ini berakar pada tradisi kuno kedua negara yang dipengaruhi oleh penyebaran agama Buddha di Tiongkok. Panchsheel juga berasal dari penyatuan 10 Prinsip Perdamaian dan Komparatif dari Konferensi Asia Afrika ke 29. *Panchsheel* membantu untuk menghindari konsep *competitive*

security yang tengah dihadapi oleh Tiongkok dan India pada perebutan Tibet (Dasgupta, 2016: 18). Pada 11 Desember 1957 oleh Majelis Umum PBB, prinsip ini kemudian mendapat suara penuh dari 160 negara. Pakta penting ini memiliki lima prinsip penting yang meliputi:

- i. Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty,*
- ii. Mutual non-aggression,*
- iii. Mutual non-interference,*
- iv. Equality and mutual benefit, and*
- v. Peaceful co-existence*

Tiongkok menekankan perjanjian Panchscheel pada awal negosiasi dengan India yang berlangsung di Delhi dari Desember 1953 hingga April 1954 antara delegasi kedua negara. Negosiasi tersebut berkaitan dengan Aksai Chin serta South Tibet atau wilayah yang dianggap oleh India sebagai Arunachal Pradesh. Perjanjian 19 April 1954. Setahun pasca ditandatanganinya perjanjian Panchsheel, Tiongkok dan India menandatangani protokol Kerjasama di Lhasa pada 1955. Di dalamnya berisi kesediaan India terkait penyerahan control atas Tibet ke Tiongkok untuk mengakui kedaulatannya di negara tersebut. Hal ini menjadi hal yang baik bagi Tiongkok karena Nehru segera menarik pengawalan militernya dari Tibet serta mencabut akses komunikasi seperti pos, telepon dan telegraf kepada Tiongkok. Pemberontak Tibet berdampak secara langsung pada eksistensi Panchsheel Agreement ternyata tidak berlangsung lama karena munculnya bentrokan bersenjata di sepanjang perbatasan Tiongkok-India. Insiden ini berlangsung di Sektor Tengah yang kemudian menyebar ke Sektor lainnya (Dasgupta, 2016: 19)

Penyerangan Tiongkok pada 21 Oktober 1959, pasukan Tiongkok dan India beradu baku tembak yang berdampak pada korban jiwa. Terlebih dengan penerbangan lama ke India pada tahun 1959 menyebabkan komplikasi serius pada hubungan India-Tiongkok. Zhou Enlai mengumumkan klaim atas 40.000 mil persegi wilayah teritorial India yang mencakup wilayah Ladakh dan Arunachal Pradesh. Hal merupakan kelanjutan dari garis McMahon Line. Tiongkok juga menyatakan klaim 50.000 mil persegi atas Sikkim dan Bhutan.

3.3.2 Kunjungan Diplomatik Pasca 15 tahun Kekosongan Hubungan Bilateral

Perang besar yang pecah pada 1962 akibat sikap impulsif kedua pihak membuat renggangnya hubungan bilateral yang terjalin. Agenda Zhou Enlai dan Jawaharlal Nehru yang melakukan pertemuan membahas masalah klaim Bhutan dan Sikkim berujung penolakan mengindikasikan hubungan diplomatik terakhir antara Tiongkok dan India. Dengan bergabungnya Sikkim Utara ke India memicu kemarahan Tiongkok akibat dugaan India memaksa dengan menyandera pemimpin mereka yakni Palden Thondup Namgyal. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan Tiongkok untuk India dipengaruhi faktor Tibet, dukungan US dan USSR kepada India yang menjadi skema buruk bagi Tiongkok. Pola kebijakan pada 1962 disebut politic-military war untuk menunjukkan kekuatan India tidak dapat menjadi panutan di Asia. India merespon dengan penempatan pasukan militer di sektor barat yang menandai puncak kemerosotan hubungan India dan Tiongkok.

Pasca berakhirnya kepemimpinan Mao dan Zhou pada 1975 membuka kemungkinan baru. Wajah baru dalam kepemimpinan Tiongkok oleh Deng

Xiaoping dan Indira Gandhi mengusulkan kesepakatan baru untuk menyelesaikan masalah perbatasan. Tiongkok dan India membuat keputusan untuk merestorasi hubungan diplomatik yang sempat merosot selama 15 tahun pada April 1976. Agenda tersebut secara simbolis ditunjukkan oleh kedua pihak dengan mengirimkan duta besar untuk datang ke masing-masing negara. Tiongkok mengirimkan Chen Chao Yuan ke India, sebaliknya India mengirim K.R Narayanan untuk menjadi perwakilan negaranya ke Tiongkok. Lewat kunjungan Menteri Luar Negeri India, Atal Bihari Vajpayee ke Tiongkok pada Februari 1979. kunjungan tersebut kedua negara aktif bernegosiasi terkait isu perbatasan terutama di sektor barat dan timur. Tiongkok mengajukan gagasan yang berisi tiga pembahasan yakni:

1. Kesadaran akan pentingnya penyelesaian lebih awal pada masalah perbatasan oleh kedua pihak
2. Kesadaran akan mewujudkan perdamaian di daerah perbatasan selama berlangsungnya proses negosiasi
3. kesadaran untuk menghindari hal yang menjadi penghalang dalam peningkatan hubungan bilateral di berbagai sektor.

India tetap bersikukuh untuk tidak melepaskan sektor timur maupun sektor barat mengacu pada “pengerasan yang signifikan”. Tiongkok menilai bahwa India telah salah memahami pendekatan mereka.

3.3.3 Negosiasi dalam *Joint Working Group* atas Sengketa Perbatasan

Kedua belah pihak telah melakukan upaya proaktif untuk menyelesaikan masalah perbatasan melalui kunjungan kenegaraan India ke Tiongkok. Perdana

Menteri Rajiv Gandhi berkunjung dengan tujuan untuk menandatangani perjanjian dan membentuk Kelompok Kerja Bersama (JWG). JWG merupakan perjanjian yang menekankan tercapainya kondisi damai selama perundingan. Perjanjian tersebut juga bertujuan untuk memperbaiki perjanjian sebelumnya, khususnya Panchsheel, yang menyebabkan memburuknya hubungan bilateral. Kelompok kerja gabungan akan menerapkan proses penyelesaian perselisihan secara kolaboratif untuk meminimalkan perbedaan pendapat. Misalnya dengan secara kolaboratif melaporkan batasan dengan versi yang berbeda (Das, 2014). Sebanyak 15 agenda pertemuan GTM diselenggarakan oleh Tiongkok dan India selama periode 1989-2005, dengan beberapa periode pertemuan meliputi:

Tabel 3. 3
Periode Pertemuan *Joint Working Group*

No	Pembahasan	Pelaksanaan JWG	Timeframe
1	2	3	4
1	Pengajuan mengenai pembahasan perihal militer dalam perwujudan <i>'peace and tranquility'</i> dalam negosiasi pembahasan garis LAC	1-4 Juli 1989	JWG ke-1 di Beijing
2	Pembahasan dalam pertemuan rutin untuk merumuskan sistematis pertukaran informasi dan transparansi kegiatan militer di pos perbatasan	31 Agustus-1 September 1990	JWG ke-2 di New Delhi

1	2	3	4
3	Merumuskan optimalisasi dan implementasi CBMs ke LAC, Kerjasama bidang keamanan dan ekonomi dan pertukaran militer	13 Mei 1991	JWG ke-3 di Beijing
4	Evaluasi dan pembahasan tiga ronde JWG sebelumnya. Kesepakatan pembentukan pertemuan personil militer dan menteri pertahanan yang diadakan dua kali dalam setahun (Juni & Oktober). Bertempat di Bum La (Sektor Timur) & Spanggur Gap (Sektor Barat). Pengusulan jaringan telepon langsung antara komandan militer.	20-21 Februari 1992	JWG ke-4 di Delhi
5	Evaluasi empat ronde JWG sebelumnya serta bertukar pandangan tentang masalah perbatasan	27-29 Oktober 1992	JWG ke-5 di Beijing
6	Penekanan transparansi terhadap pos terdepan penjagaan perbatasan sepanjang LAC. Pencegahan gangguan udara berupa pesawat tempur (radius – 10 km) dan penarikan pasukan militer	25-30 Juni 1993 di New Delhi	JWG ke-6 di Delhi
7	Ratifikasi perjanjian Perdamaian dan Ketenangan tahun 1993. Klarifikasi atas perbedaan pandangan tentang aturan di sepanjang LAC yang menjadi penyebab kontak senjata antara People's Liberation Army (PLA) dan Indian Army	6-7 Juli 1994	JWG ke-7
8	Kedua negara sepakat untuk menarik kembali pasukan militer di empat pos terdepan sejauh 50-100 meter dari LAC	18-20 Agustus 1995 di New Delhi	JWG ke-8 di Delhi

1	2	3	4
9	Peningkatan kunjungan antar jenderal militer dan pembangunan pos penjagaan bersama di sekitar LAC khususnya sektor timur	16-18 Oktober 1996 di Beijing	JWG ke-9 di Beijing
10	Ratifikasi perjanjian tentang CBMs 1996. Klarifikasi LAC untuk menentukan definisi garis perbatasan secara bersama. Penekanan pada implementasi CBMs 1993 dan 1996 pada JWG.	4-5 Agustus 1997 di New Delhi	JWG ke-10 di Delhi
11	Penerapan pendekatan “Forward Looking” dan membentuk kelompok ahli dalam sengketa perbatasan. Lanjutan pembahasan klasifikasi LAC dan implementasi DBMs dalam JWG	26-27 April 1999 di Beijing	JWG ke-11 di Beijing
12	Penerapan pendekatan “Forward Looking” dan membentuk kelompok ahli dalam sengketa perbatasan. Lanjutan pembahasan klasifikasi LAC dan implementasi DBMs dalam JWG	28-29 April 2000 di New Delhi	JWG ke-12 di Delhi
13	Penerapan pendekatan Konstruktif dan penekanan pendekatan “Forward Looking” dalam usaha penyelesaian sengketa perbatasan. Bertukar pandangan tentang masalah yang terjadi di regional dan internasional	31 Juli – 1 Agustus 2000 di New Delhi	JWG ke-13 di Delhi
14	Penekanan kembali pendekatan “Forward Looking” dan tukar pendapat tentang peta wilayah di sektor barat	21-22 November 2002 di New Delhi	JWG ke-14 di Delhi
15	Pembahasan dan evaluasi menyeluruh tahapan JWG 1-14. Evaluasi hubungan bilateral politik, keamanan maupun ekonomi selama proses negosiasi. Klarifikasi LAC dan Implementasi CBMs dalam proses JWG	30-31 Maret 2005	JWG ke-15

(Das, 2014)

Pada perjanjian ini disepakati untuk menyelesaikan masalah atas perbedaan yang tidak boleh mempengaruhi perkembangan hubungan bilateral. Pada pasal V disebutkan bahwa kedua pihak berhak mempertimbangkan bukti sejarah, sentiment nasional, kesulitan praktis dan keadaan sebenarnya di perbatasan. Namun, adanya mispersepsi atas pasal VII mengenai “menjaga kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan” dimana Tiongkok justru menyatakan pada 2007 bahwa “keberadaan daerah berpenduduk tidak akan mempengaruhi klaim Tiongkok atas Tawang, Arunachal Pradesh” (Chansoria, 2020). Hal ini yang membuat India menguatkan militernya di sekitar Arunachal Pradesh.

3.3.4 Terbentuknya Kesepakatan *Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control*

Setelah kunjungan Perdana Menteri Li Peng dan delegasi Tiongkok ke India, kesepakatan dicapai. Kunjungan ini menjadi momentum setelah hubungan bilateral kedua negara terputus sejak tahun 1960, yang berlangsung selama 31 tahun. Perdana Menteri Narasimha Rao membawa kebijakan baru ke Tiongkok mengenai penentuan garis perbatasan. Untuk menyelesaikan konflik perbatasan, Rao meningkatkan garis militer dan kembali ke pendekatan sektoral daripada keseluruhan. Namun, China menolak saran tersebut dan terus menerapkan pendekatan secara keseluruhan, juga dikenal sebagai LAC (Sawhney & Wahab, 2017, hlm. 2-10).

Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control (LAC) China-India juga ditandatangani oleh Rao dan Li Peng pada September 1993. Perjanjian ini dibuat sebagai langkah berdasarkan *Measures of*

Confidence Building (CBMs) untuk mengurangi saling curiga selama proses negosiasi. Perjanjian ini dibuat untuk mengurangi ketidakpercayaan selama proses negosiasi dan didasarkan pada CBMs. Selain itu, kedua negara bersumpah untuk menghentikan penggunaan kekuatan militer di wilayah tersebut, menyelesaikan konflik melalui konsultasi dan kerja sama, serta mengurangi kekuatan militer kedua negara di Tibet. Selain itu, Tiongkok dan India setuju untuk mempertahankan militer mereka di sepanjang LAC berdasarkan prinsip keamanan setara dan timbal balik (Tripathi, 2012, pp. 1-5).

Pada perjanjian ini menegaskan bahwa kedua pihak harus menjaga kekuatan militernya ke tingkat minimum untuk mengurangi ketegangan di sepanjang LAC. Kemudian adanya pembatasan Latihan militer yang harus dikonsultasikan mengenai bentuk, skala dan Tindakan verifikasi yang efektif. Namun, menurut Chansoria (2020) LAC adalah garis perbatasan yang paling dijaga di dunia baik di sektor barat maupun timur dengan pasukan militer terbanyak.

3.3.5 India-Tiongkok dalam Perjanjian mengenai Kerjasama Pertahanan Perbatasan (BDCA)

Border Defence Cooperation Agreement (BDCA) ditandatangani oleh Tiongkok-India pada 23 Oktober 2013 di Beijing. Kesepakatan ini merupakan respon dari insiden baku tembak di Depsang, Aksai Chin yang menimbulkan koersif diplomasi dan strategi dari kedua pihak. BDCA menjadi salah satu langkah untuk menciptakan progress penyusunan resolusi atas sengketa perbatasan LAC. Dalam perjanjian ini Tiongkok-India berupaya untuk menegakkan tolak ukur strategis bahwa tidak ada pihak yang menggunakan kemampuan militernya

melawan pihak lain. Pada pasal VI menyatakan ‘Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengikuti atau membuntuti patrol pihak lain yang tidak memiliki kesepakatan mengenai LAC. Poin tersebut karena kedua negara saling memata-matai yang menandai kurangnya kepercayaan antara kedua pihak (Das, 2014).

Namun, perjanjian BDCA dianggap gagal sebab tidak memberikan dampak substantif dan justru menjadi perjanjian simbolis. Dimana kedua negara justru melancarkan serangan di wilayah dengan saling memata-matai militer satu dan lainnya. Menurut Chansoria (2020), BDCA dianggap perjanjian yang kurang komitmen dengan menyatakan kalimat yang tidak tegas seperti ‘mungkin mempertimbangkan’. Dengan begitu, aksi untuk mencurigai pun saling dilemparkan oleh Tiongkok maupun India. Sebagaimana, Tiongkok yang mencurigai Pembangunan infrastruktur di Arunachal Pradesh dengan berulang kali melakukan penyusupan.

Pada proses negosiasi, negosiator Tiongkok tentu melakukan *Social Evaluation* atau keadaan dalam proses interaksinya dengan India. *Social Evaluation* merupakan sentral dari *Face Threat Sensitivity* (FTS) sebagai reaksi dari proses negosiasi yang memiliki potensi besar mengancam kepemilikannya. Menurut White (2004), wajah adalah sebuah situasi yang dapat berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Oleh karena itu, wajah dapat merasakan ancaman yang terjadi atas situasi tertentu seperti dipermalukan, kemarahan, tidak nyaman dan sebagainya. Dengan begitu, semakin besar situasi yang terjadi semakin besar pula reaksi emosional yang dihasilkan. Negosiasi menjadi keadaan yang berpeluang besar mendapat reaksi emosional tertentu karena negosiator harus lebih kompetitif dan

mengurangi kompromi untuk mendapat kesepakatan yang sepadan. White (2004) menjelaskan bahwa secara garis besar dua reaksi pada negosiasi adalah a) negosiator tidak akan memperhatikan penawaran dari pihak lain (negative); b) mempertahankan hubungan jangka panjang yang kooperatif (positif)

Dalam negosiasi pemerintah Tiongkok menyatakan kekhawatirannya mengenai kerugian atas wilayah perbatasan. Hal ini menandakan bahwa *Mianzi* Tiongkok mendapat ancaman negatif yang berupa eksistensi India di perbatasannya. Terdapat kurang lebih 30 putaran negosiasi yang membahas mengenai penyelesaian konflik LAC. Namun, negosiasi tidak dapat hanya dilaksanakan tanpa memperhatikan faktor lain seperti budaya wajah individu atau negara. Sebagaimana Toomey (1998) menyebutkan tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu i) *Knowledge*; ii) *Mindfulness*; iii) *Interaction Skill*. Ketiga hal tersebut harus diperhatikan dalam memulai negosiasi.

Pada penerapan isu, *Knowledge dimension* berkaitan dengan kolektivitas, kekuatan, dan self-face. Kasus LAC diawali dengan hasil negosiasi yang timpang dimana merugikan pihak lainnya, yakni Tiongkok yang menerapkan kolektivisme. Perumusan konferensi tripartite antara China, Tibet dan India di Simla pada April 1914 yang menghasilkan Konvensi Simla untuk menerima McMahon Line sepanjang 850 mil dari garis Tibet dan India Tiongkok menolak legalitas dari konvensi tersebut karena Tibet dianggap bukan pihak independen yang berhak untuk menandatangani perjanjian setelah diakuinya Tiongkok dalam Suzerainty nya di Tibet (Chansoria, 2020: 7). Hal ini berkaitan dengan aspek *Mindfulness* yaitu *avoid political loss* terkait legitimasi Tiongkok atas Tibet. Namun, India tidak

menunjukkan itikad baik dalam aspek interaction skill justru mendukung separatis Tiongkok. Ketidakpuasan ini menghilangkan *Miàanzi* Tiongkok, sehingga kebijakan invasi Tiongkok diluncurkan ke Tibet pada 1950 sebagai bentuk otoritasnya.

Ketidakpuasan hasil negosiasi untuk membahas batas perbatasan menyebabkan posibilitas persetujuan dengan kontribusi militer nyatanya berlangsung Panjang pada era Deng Xiaoping. Dimana berlangsung pada tiga fase, fase I (1981-1987) total terdapat 8 putaran negosiasi; fase II (1988-2003) Joint Working Group; fase III (2003-saat ini) dengan agenda "*Boundary Question*" telah berlangsung 22 putaran negosiasi dan belum berhasil menciptakan kesepakatan. CBM sebagai pihak resolusi untuk mengurangi ketegangan nyatanya gagal memberikan terobosan dan mencapai kebuntuan. Hal ini karena resolusi dinilai tidak menguntungkan '*Zero Sum*'.

Statement tersebut tidak diwujudkan pada proses penyelesaian konflik yang mana pihak India menunjukkan kedekatan dengan AS. AS menjadi rival terbesar Tiongkok yang telah memberikan dukungan pada gerakan separatis Tibet melalui '*Tibet House*' oleh karena itu dianggap hal yang tidak menghargai kedaulatan Tiongkok yang melanggar *Self-face* nya. Selain itu, dilansir dari media Global Times (2022) bahwa India melanggar perjanjian dengan menggunakan senjata di Selatan Danau Pangong. Tiongkok berpendapat bahwa "*Who is lying? Who has disregarded and violated the pacts since 1993? Obviously it's India, not China,*" (Global Times, 2022). Oleh karena itu, aksi India mendapat sambutan yang tidak hangat yang memanipulasi agar Tiongkok menjadi pelaku dari pelanggaran. Penerapan teori face negotiation bahwa citra sangat mempengaruhi identitas

sehingga Tiongkok selalu menerapkan prinsip identitas yang tepat untuk membangun reputasinya kembali.

3.4 Dampak Kebijakan yang menimbulkan Indikasi Kebuntuan Diplomatik

Mintz (2004) menyampaikan dalam teori Poliheuristik bahwa output menjadi tahap akhir yang menggambarkan bagaimana sebuah pihak merespon sebuah isu pada kebijakan luar negeri baik bersifat sementara maupun permanen. Keputusan ini merupakan kajian yang berasal dari proses kognitif berbasis dimensi dimana “pemimpin Tiongkok memegang prinsip *non compensatory* sebagai wujud nasionalisme dan takutnya kehilangan wajah sebagai bentuk *Avoid political loss*” serta ‘pemimpin Tiongkok ingin situasi yang menguntungkan’ dari sisi rasional. Pada teori PH, domestik politik merupakan “*the essence of decision*” (Mintz, 2004). Bentuk sosialisme Tiongkok yang berpusat pada rezim ini mendorongnya untuk menyeleksi alternatif dimensi (sisi rasional) jika tidak dapat mempertahankan status politiknya. Meskipun memerlukan waktu lama dalam penyelesaiannya.

Terdapat argumen yang penulis sampaikan pada penyelesaian konflik LAC ini. Penulis menilai bahwa dampak kebijakan yang dibangun oleh kedua negara bersifat kontradiktif. Hal ini karena sulitnya membangun keselarasan yang disebabkan adanya tumpang tindih kepentingan yang kompleks.

Pada aspek kognitif, kedua negara menghargai budaya, kultur sebagai kepentingan domestik. Ideologi yang saling bersebrangan kemudian menciptakan dorongan nasionalisme yang besar. Pada aspek rasional, para pembuat keputusan menilai adanya kompetisi geopolitik yang menimbulkan ketidakamanan bagi kedua negara. Jika situasi ini kerap memanas hingga berulang pada sebuah proses penyelesaian konflik maka mengindikasikan adanya kebuntuan diplomatik. Argumen ini diperkuat dengan beberapa situasi yang kontradiktif atau jauh dari proses resolusi.

3.4.1 Strategi Geopolitik yang Tumpang Tindih

Rivalitas politik Tiongkok dan India di Asia Selatan dan Tenggara mengakibatkan munculnya tumpang tindih regionalisme dan hegemoni di kawasan tersebut. Baik Tiongkok maupun India telah menciptakan skema kerja sama regional dengan fungsi dan mandat yang tumpang tindih. Disisi lain, negara-negara kecil di kawasan ini telah bergabung dalam inisiatif ini karena adanya insentif material yang nyata dan serangan daya tarik diplomatik dari kedua negara tersebut. Persaingan antara Tiongkok dan India ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk memperebutkan "hegemoni kooperatif" yang menjadi pendorong munculnya rangkaian skema kerja sama regional yang saling kontra (Cotillon, 2017). Selain itu, konflik muncul dengan kehadiran India di Laut Cina Selatan melalui kerja sama energi dengan Vietnam yang telah mendorong internasionalisasi perselisihan tersebut. Hal ini menciptakan sentimen Tiongkok terhadap India semakin meningkat.

Periphery Diplomacy oleh Tiongkok menjadi salah satu strategi yang menimbulkan intensitas konflik antara Tiongkok-India atas situasi overlapping Geopolitik tersebut. Menurut Mohan (2018), India berpendapat bahwa Tiongkok melancarkan aksi untuk *'to keep India off-balance in its own Neighbourhood'*. Kalimat tersebut dapat dianalisis oleh penulis sebagai Upaya Tiongkok untuk mengancam stabilitas hubungan India dan negara kawasan. Kalimat *"off balance"* menandai bahwa India berpotensi berada dibawah kontrol Tiongkok atas pengaruhnya di kawasan. Tiongkok menilai bahwa *power* yang dimilikinya mampu 'menundukkan' India agar Tiongkok menjadi major power di kawasan tersebut. Hal ini membuat India merasa tidak aman terhadap eksistensi Tiongkok yang semakin menguat.

Narasi tersebut menandai adanya asimetri kekuatan antara Tiongkok dan India, dengan Tiongkok sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut. Asimetri kekuatan ini telah menyebabkan persaingan dan ketegangan antara kedua kekuatan tersebut. India melihat strategi Tiongkok sebagai ancaman kepentingannya kemudian diluncurkannya kebijakan luar negeri India yang lebih asertif. Tumpang tindih ini berdampak pada semakin sulitnya konflik LAC terselesaikan.

3.4.2 'Suspicious' Strategy yang Intens antara Kedua Pihak

Persepsi negatif yang saling dilontarkan oleh kedua pihak membuat India maupun Tiongkok tidak dapat membendung kecurigaan yang intens antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, kecurigaan ini diselipkan pada strategi yang dirancang untuk saling memantau. Hal ini dicerminkan dari konflik LAC yang berkepanjangan yang mempengaruhi relasi diplomatik antara Tiongkok dan India.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut yaitu faktor internal maupun eksternal.

Pada faktor Internal yang dipengaruhi oleh dimensi politik dan kognitif dari kedua pihak. Situasi dimana Tiongkok merasa terancam atas sikap India membuat harus bereaksi secara negatif. Mispersepsi adalah penyebab awal timbulnya kecurigaan satu dan lainnya. Tiongkok meyakini bahwa reaksi agresif yang ditetapkannya merupakan ulah dari aksi misinterpretasi India yang fatal pada wilayah milik Tiongkok. Terlebih kehadiran Dalai Lama dalam persaingan Tiongkok-India. Dalai lama merupakan pemimpin Tibet yang pro pada India melalui pernyataan bahwa Arunachal Pradesh merupakan bagian dari India berdasarkan konvensi Simla 1914 (Times of India, 2008). Sehingga akan selalu ada aksi-reaksi seperti meningkatkan infrastruktur militer yang semakin massif.

India pun menerapkan strategi “*punitive deterrent*” untuk membendung strategi militer Tiongkok. Dalam merespon nya, India menjadi pihak yang memiliki mispersepsi terbesar atas ancaman Tiongkok. Menurut Liu Suwei (2020), kondisi ini menandai adanya konflik asimetri antara kedua pihak. Menurut Survey oleh Pew (2016) menunjukkan bahwa 69% responden india menilai Tiongkok merupakan ancaman yang besar. Sedangkan, hanya 30.9 % responden dari Tiongkok yang menilai bahwa India merupakan ancaman (Siwei, 2020: 6).

Respon ini berkaitan dengan sensitivitas *Miànzi* pada Tiongkok akan sebuah penghormatan pada sebuah kesejajaran status. Dimana India merupakan “*Middle Power*” sehingga Tiongkok tidak menilai India sebagai ancaman langsung atau

‘rival yang serius’. Berdasarkan wawancara penulis secara langsung dengan Prof. Zhao Changfeng (2023) menyampaikan bahwa:

“*Government has a core value that implemented in a cognitive process of each decision makers. Miànzei is about respect that reflects on some condition when parties respect others we will give a positive feedback as well. That it could maint a good diplomatic relation.* (Pemerintah memiliki nilai inti yang diimplementasikan dalam proses kognitif setiap pengambil keputusan. *Miànzei* adalah tentang rasa hormat yang merefleksikan suatu kondisi dimana ketika pihak lain menghormati pihak lain, kami akan memberikan umpan balik yang positif juga. Hal itu dapat menjaga hubungan diplomatik yang baik)”

Pada isu LAC, Tiongkok percaya bahwa kekuatan militernya melampaui militer India. Pada segi ekonomi, India pun kerap bergantung pada Tiongkok yang menandakan ekonomi yang lebih lambat. Persepsi ini relevan dengan nasionalisme Tiongkok ‘*us versus them*’ yang menilai tingginya integritas dan kemampuan Tiongkok pada area internasional. Kemudian, sentimen nasional menjadi reaksi atas persepsi kedua pihak. India menumbuhkan sentiment nasionalisme hingga menutup akses Kerjasama perekonomian dengan Tiongkok termasuk pelarangan adanya aplikasi Tiongkok yang beroperasi di India.

Pada faktor eksternal, keterlibatan AS menjadi salah satu faktor sulitnya mencapai kondisi damai. Kehadirannya ditandai dengan mendaratnya *American nuclear-powered aircraft* yang mana menjadi simbol bahwa AS hadir untuk India dalam membentuk Kerjasama Pertahanan “*quasi-allied*”. Tiongkok menilai AS memanfaatkan konflik untuk menjadikan kawasan Asia Selatan sebagai area utama Pembangunan strategi ‘*free and open Indo-Pacific*’ yang memicu persaingan hingga konfrontasi bilateral antara AS-Tiongkok. Strategi “otonomi strategis” oleh India-AS semakin memicu kecurigaan Tiongkok.

Terlibatnya Amerika Serikat pada situasi kebuntuan tentu membuktikan kecurigaan Tiongkok terhadap India atas tujuan mereka meningkatkan pengaruh di Asia Selatan. Selain itu, hadirnya Jepang, Australia serta negara Asia Selatan dalam Kerjasama dengan AS menjadi salah satu faktor yang mengancam stabilitas keamanan Tiongkok. Terutama strategi Indo-Pasifik yang akan menggerus strategi politiknya yaitu *Belt & Road Initiative* (BRI) dengan mencari dukungan kepada beberapa mitra potensial Tiongkok. Hal ini tentu tidak sesuai dengan mimpi Tiongkok "*Chinese Dream*". Kehadiran Kerjasama AS-India juga dapat merusak Langkah Tiongkok melakukan *Periphery Diplomacy* dengan negara kawasan Asia Selatan. Situasi ini membuat Tiongkok semakin asertif dengan peningkatan kemampuan militer yang mumpuni.

3.4.3 Memelihara *Status Quo*

Siwei (2020) mengungkapkan bahwa konflik LAC merupakan "*very complex*" bagi kedua pihak dimana tidak ditemukan solusi efektif untuk menyelesaikan isu. Sebagaimana Beijing yang memiliki kekhawatiran dengan adanya penyelesaian tanpa konsesi teritorial. Penyelesaian ini tentunya akan merugikan Tiongkok di Asia. Nilai strategis ketiga sektor seperti Aksai Chin tentu memiliki pengaruh besar bagi mega proyek Tiongkok. Kekhawatiran ini disampaikan Zhou pada 1960 bahwa 'Pemerintah India akankah mengambil sikap yang sama ketika Tiongkok bersiap mengakomodasi India di Sektor Timur'. Tiongkok ingin Pemerintah India mengambil sikap yang saling mempertimbangkan dengan memberikan Arunachal Pradesh kepada Tiongkok. Namun, nampaknya kedua pihak sulit mencapai kata sepakat.

Isu ini pun menemui titik “*Zero-sum game*” yang ditandai dengan keuntungan didapat bila pihak lain kalah yang berarti merugikan salah satu pihak. Respon kedua negara tentu menolak dan memilih mempertahankan *status quo*. Bias *Status Quo* mempengaruhi sisi kognitif dimana dua kondisi muncul yaitu *loss aversion* dan *avoidance*. *Loss Aversion* atau keengganan dalam kehilangan berdampak pada kekecewaan akibat kerugian yang diderita (The Decision Lab, 2020). Dari perspektif Tiongkok, *Loss Aversion* meningkatkan sensitivitas *Miànzhi* dimana akan tercorengnya citra Tiongkok yang memiliki postur militer dan ekonomi yang lebih kuat dari India. *Loss Aversion* selaras dengan FTS yang mendeteksi adanya dampak negatif pada wajah (status sosial). Dimana setiap entitas menghindari kehilangan wajah yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Oleh karena itu, kedua pihak akan cenderung *avoidance* pada situasi yang akan merugikannya. Dengan begitu, *Status Quo* dipilih menjadi alternatif sementara hingga negosiasi menemukan pilihan yang tidak merugikan.

Status Quo berarti anti-perubahan yang menjadi hambatan terbesar dalam proses diplomatik. Negosiasi bersifat revisionis untuk menyelesaikan permasalahan, namun, jika negosiasi telah dilakukan namun kedua pihak memilih *Status Quo* maka keputusan bersifat *Non-Agreement* (NA). Jika periode NA dalam jangka waktu panjang seperti isu LAC dalam 40 tahun. Maka dapat dikatakan bahwa negosiasi menemukan jalan buntu atau *diplomatic deadlock*. *Status Quo* berdampak pada tidak adanya konvensi yang cukup untuk mencapai terobosan penyelesaian dan berujung pada situasi *Mutually Hurting Stalemate*.

Menurut teori *Face Negotiation*, peran wajah tidak terhindarkan pada sebuah konflik terutama pada negara yang menganut kultur kuat seperti Tiongkok maupun India. Konflik akan merusak citra dan rekognisi mereka di dunia internasional. Sehingga budaya wajah berkontribusi sebagai Batasan untuk pihak lain yang ingin berkomunikasi. Tiongkok sangat menghargai perwujudan *Miànzi* mereka atas keinginan bangkit dari penghinaan. Dalam menghadapi konflik, mempertahankan *Miànzi* memiliki dampak signifikan pada bagaimana pemerintah China akan mempengaruhi opini publik dengan adanya *Miànzi*. Pendapat ini diperkuat oleh Prof. Zhao Changfeng pada kesempatan wawancara yang menyebutkan bahwa *Miànzi* berdampak pada dorongan bersatu diantara warga negara. Sehingga, konsep *Miànzi* dapat membantu orang merasakan kewajiban ‘*sense of duty*’ untuk melindungi reputasi negaranya. Lebih lanjut, Prof. Zhou menyampaikan bahwa:

“Preserving miànzì becomes linked to upholding the nation's identity, values, and historical achievements, all of which contribute to the nationalist narrative. China's international image is affected by its response to conflicts (Pelestarian miànzì berkaitan dengan penegakan identitas, nilai-nilai, dan pencapaian sejarah bangsa, yang semuanya berkontribusi pada narasi nasionalis. Citra internasional Tiongkok dipengaruhi oleh respons Tiongkok terhadap konflik)”

Dari setiap putaran pembicaraan tentang perbatasan beberapa kegagalan menandai adanya keengganan untuk mematuhi, sebaliknya kedua pihak ingin mempertahankan *status quo*. Baik dari sisi Tiongkok maupun India yang menghindari adanya perubahan pada *status quo* karena menilai situasi yang ‘*zero-sum game*’. Menurut Chansoria (2018) Tiongkok-India menjadi satu-satunya negara yang tidak dapat dipisahkan meskipun telah melalui kesepakatan Bersama yang telah ditentukan.

Fokus dan niat menyelesaikan begitu minim meskipun telah dilaksanakan melalui mekanisme perbatasan yang seolah-olah menjanjikan di atas kertas. Perjanjian dinilai gagal menghasilkan sesuatu yang nyata sehingga hubungan kedua negara terhambat oleh kebuntuan. Strategi Tiongkok untuk menciptakan pola yang tidak dapat diprediksi baik sikap diplomatic, tekanan militer dan strategi ekonomi yang menyusutkan India secara perlahan meningkatkan pengaruhnya pada India sebagai *Asian Power* untuk mempertahankan *Miànzì*.